

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Alya Ayu Azaria
NPP. 32.0409
Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Kebijakan Publik
Email: 32.0409@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Waste management remains a persistent issue in Indonesia, including in Semarang City. Improperly managed garbage not only causes foul odors and diminishes urban aesthetics but also poses risks to environmental sustainability and public health. Despite existing waste management policies, their implementation has not been optimal, particularly due to limited dissemination of knowledge and a lack of behavioral change among the community. The problem is compounded when local governments are unable to effectively engage citizens in waste reduction efforts. **Purpose:** This study aims to evaluate the effectiveness of waste management policies in Semarang City by examining six key dimensions of policy implementation and identifying the challenges and initiatives undertaken to support sustainable waste practices. **Method:** A descriptive qualitative research method was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. **Result:** Based on the six dimensions of policy evaluation by Dunn, the research findings indicate the following: (1) Effectiveness of the policy has been moderately achieved at the government level, but a lack of public awareness hinders optimal outcomes; (2) Efficiency has not been fully realized due to budget limitations and dependence on community waste collection fees; (3) Adequacy remains insufficient as active community participation is still low; (4) Responsiveness among the public varies and does not yet reflect significant engagement with the implemented policies; (5) Appropriateness of the policy has been directed through education and outreach by the Environmental Agency (DLH), but its implementation at the community level remains weak; (6) Only in the equity dimension can the policy be considered relatively effective, as access to waste management facilities has been fairly distributed. **Conclusion:** Waste management policy implementation in Semarang City has shown partial effectiveness. While some structural efforts have been made, greater coordination between stakeholders and more impactful community engagement strategies are needed to ensure the sustainability and success of waste management initiatives. **Keywords:** Policy Evaluation; Waste Management; Community Participation; Socialization and Education; Semarang City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan sampah di Kota Semarang masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara optimal. Meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah dijalankan oleh pemerintah daerah, kenyataannya masih terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap, mengganggu keindahan kota, merusak kelestarian lingkungan, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya pengelolaan yang baik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. **Tujuan:** Penelitian

ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan menilai implementasi kebijakan tersebut berdasarkan enam dimensi evaluasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn, hasil penelitian menunjukkan: (1) Efektivitas kebijakan cukup tercapai di tingkat pemerintah, namun kurangnya kesadaran masyarakat menghambat hasil yang optimal; (2) Efisiensi belum tercapai karena keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada retribusi masyarakat; (3) Kecukupan belum memadai karena partisipasi aktif masyarakat masih rendah; (4) Responsivitas masyarakat masih beragam dan belum menunjukkan keterlibatan yang signifikan terhadap kebijakan yang diterapkan; (5) Ketepatan kebijakan sudah diarahkan melalui edukasi dan sosialisasi oleh DLH, namun implementasi di tingkat masyarakat masih lemah; (6) hanya pada dimensi pemerataan kebijakan dapat dikatakan berjalan cukup efektif. **Kesimpulan:** Pengelolaan sampah di Kota Semarang masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat serta optimalisasi sumber daya untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif. **Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Partisipasi Masyarakat; Sosialisasi dan Edukasi; Kota Semarang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama karena terus meningkatnya jumlah penduduk yang secara langsung berdampak pada peningkatan volume timbulan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga bencana seperti banjir dan kebakaran (Santosa, 2024; Irmawati, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sampah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan dan kulit buah, serta sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik dan kaleng (Meyrena & Amelia, 2020). Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia, berada di peringkat ke-5 menurut laporan The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 dari Bank Dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, baik dari segi regulasi, teknologi, maupun partisipasi masyarakat (Setyono & Sinaga, 2021). Beberapa studi sebelumnya menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi mutakhir menjadi kunci dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ufnia dan Hendrayanti (2023) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Di sisi lain, implementasi konsep smart city di Kota Bogor yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan sampah juga menunjukkan hasil positif dalam peningkatan efisiensi dan partisipasi publik (Sa'adiyah, Purnomo, & Kasiwi, 2020). Selain itu, pembangunan ecoliteracy dan penegakan hukum persampahan menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah secara menyeluruh (Purnomo & Sa'adiyah, 2020).

Lebih lanjut, Zhang et al. (2023) dalam penelitiannya menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pemilahan sampah sangat bergantung pada kemauan politik yang kuat serta keterlibatan publik yang berkelanjutan. Dalam studi mereka di Shanghai, keterlibatan masyarakat dalam memisahkan sampah dari sumbernya terbukti efektif ketika didukung oleh insentif, sosialisasi yang berkelanjutan, dan sistem evaluasi yang ketat. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan ketersediaan kebijakan atau infrastruktur, melainkan juga dengan strategi yang mampu mendorong perubahan perilaku secara nyata. Salah satu provinsi dengan timbulan sampah tertinggi di Indonesia adalah Jawa Tengah, yang pada tahun

2023 mencatatkan jumlah timbunan sebanyak 5,37 juta ton. Dari jumlah tersebut, Kota Semarang menjadi penyumbang terbanyak, yaitu sebesar 431.534,65 ton (SIPSN.go.id, 2024). Sebagian besar sampah di Jawa Tengah berasal dari sektor rumah tangga, mencapai 37,06% dari total timbunan (SIPSN.go.id, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga memegang peranan penting dalam upaya pengurangan volume sampah. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota metropolitan di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018. Kebijakan ini mencakup pengurangan sampah di sumbernya melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan pengelolaan sampah terpadu, serta peningkatan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Meskipun kebijakan tersebut sudah diterapkan selama lima tahun, namun peningkatan jumlah timbunan sampah masih terus terjadi. Bahkan, permasalahan serius seperti kebakaran di TPA Jatibarang pada 18 September 2023 menjadi bukti nyata belum optimalnya pengelolaan sampah. Kebakaran tersebut terjadi akibat akumulasi gas metana dari pembusukan sampah yang mudah terbakar dan berdampak langsung pada masyarakat sekitar.

Selain itu, timbunan sampah juga menjadi penyebab terjadinya banjir di beberapa wilayah di Kota Semarang, karena menyumbat saluran air dan menghambat drainase. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dan lemahnya sistem monitoring serta evaluasi kebijakan (Damanhuri & Padmi, 2006; Hasibuan, 2016). Berdasarkan situasi tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya serta faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi berbagai kendala tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai pengelolaan sampah telah banyak dilakukan baik dalam lingkup nasional maupun lokal. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah, seperti metode pengolahan sampah organik, penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga. Misalnya, penelitian oleh Damanhuri dan Padmi (2006) menyoroti pentingnya peran teknologi dan pemilahan sampah dari sumbernya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Sementara itu, Hasibuan (2016) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai bagian dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kota, khususnya di Kota Semarang, masih tergolong terbatas. Sebagian besar studi lebih menekankan pada perilaku masyarakat atau strategi pengelolaan sampah oleh sektor informal, tetapi belum banyak yang mengkaji secara komprehensif efektivitas kebijakan daerah, kendala implementasi, serta peran lembaga pemerintah, seperti Dinas Lingkungan Hidup, dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah di wilayah urban. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun, setelah lima tahun kebijakan ini berjalan, masih belum ada kajian mendalam yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, serta apakah strategi yang dijalankan sudah efektif dalam menurunkan timbunan sampah secara signifikan. Kesenjangan penelitian juga tampak dalam konteks bencana lingkungan yang terjadi akibat kurang optimalnya pengelolaan sampah, seperti kebakaran di TPA Jatibarang pada tahun 2023 serta banjir yang dipicu oleh penyumbatan saluran akibat sampah. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengevaluasi sejauh mana

kebijakan yang telah ditetapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang nyata

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Fokus utama terletak pada analisis implementasi kebijakan, identifikasi hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan aplikatif terhadap kondisi riil di lapangan, serta menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengelola permasalahan sampah secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan beragam pendekatan dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia. Salsabila et al. (2024) meneliti kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan dan menemukan bahwa meskipun aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan kemajuan, partisipasi masyarakat dan ketersediaan SDM masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Bryan dan White (1987). Sementara itu, Ramadanti (2023) dalam penelitiannya di Kota Kendari menyoroti faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan, dengan rekomendasi berupa peningkatan anggaran, sarana prasarana, serta edukasi kepada masyarakat. Ia menggunakan teori dari Knill & Tosun (2020). Rahmawati et al. (2024) mengulas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis metode 3R di Provinsi Jawa Tengah, menemukan bahwa meskipun program berjalan cukup baik, pemerintah perlu lebih aktif dalam sosialisasi ke masyarakat. Berbeda dengan lainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Zakirin (2022) mengevaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Dunn, dan meskipun tidak secara langsung membahas sampah, hasilnya memperkaya perspektif evaluatif kebijakan publik secara umum

Ilhami (2024) dalam skripsinya mengenai Kabupaten Banyumas, menemukan kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya infrastruktur, dan merekomendasikan peningkatan edukasi serta fasilitas. Kedua penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari Dunn (2003). Penelitian oleh Mokodompis et al. (2019) di Kota Manado mengungkap hambatan implementasi kebijakan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sarana prasarana, serta lemahnya penegakan hukum, menggunakan teori implementasi dari Edwards III (1980). Yusniyar et al. (2016) meskipun berfokus pada evaluasi aplikasi keuangan, tetap relevan melalui penggunaan konsep evaluasi, meskipun memakai teori berbeda dari Ilya Avianty (2003). Penelitian oleh Sholehatin & Lituhaty (2025) secara langsung berkaitan dengan konteks Kota Semarang dan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk masalah sumber daya dan keterlibatan masyarakat. Ia menawarkan solusi berupa penambahan SDM dan anggaran serta pelibatan sektor swasta dan komunitas. Penelitian ini memakai teori implementasi dari Knill & Tosun (2020). Terakhir, Harjanti dan Anggraini (2020) menyoroti pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, Kota Semarang, yang sudah cukup baik secara fasilitas, namun fokus penelitian lebih kepada sistem pengelolaan di TPA dan dampaknya kepada masyarakat.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu memberikan wawasan penting mengenai aspek implementasi, evaluasi, dan tantangan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Namun, masih terdapat ruang untuk mengevaluasi secara komprehensif kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan fokus pada efektivitas kebijakan yang telah berjalan, hambatan pelaksanaan, serta respon dari masyarakat dan lembaga pelaksana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan evaluatif terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn (2003) yang mencakup enam dimensi utama: efektivitas, efisiensi,

kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh dan sistematis terhadap keberhasilan maupun kekurangan implementasi kebijakan dari berbagai sisi. Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi antara fokus lokasi, pendekatan teori, dan kedalaman analisis. Berbeda dengan Sholehatin & Lituhayu (2025) yang juga meneliti Kota Semarang namun menggunakan teori implementasi dari Knill & Tosun (2020) serta menitikberatkan pada hambatan dan solusi administratif, penelitian ini menilai efektivitas kebijakan secara komprehensif berdasarkan enam indikator evaluatif Dunn. Harjanti & Anggraini (2020) juga membahas Kota Semarang namun terbatas pada sistem pengelolaan di TPA Jatibarang, tidak menyentuh aspek evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Penelitian-penelitian lain seperti Salsabila et al. (2024) dan Ramadanti (2023) menggunakan teori yang berbeda (Bryan & White, serta Knill & Tosun) dan dilakukan di luar Kota Semarang, dengan fokus pada faktor implementasi seperti komunikasi, sumber daya, atau hambatan administratif, tanpa mengulas efektivitas kebijakan dari enam dimensi evaluatif. Sementara itu, Rahmawati et al. (2024) menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga lebih menitikberatkan pada kerangka hukum dan bukan evaluasi kebijakan secara praktis di lapangan.

Penelitian Ilhami (2024) memang menggunakan teori evaluasi Dunn, namun dilakukan di Kota Palu dan Kabupaten Banyumas, dengan hasil temuan yang sangat kontekstual dan tidak merepresentasikan kondisi Kota Semarang yang memiliki karakteristik birokrasi, sosial, dan lingkungan berbeda. Zakirin (2022) juga menggunakan teori Dunn namun pada kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), bukan pada sektor pengelolaan sampah. Mokodompis et al. (2019) dan Yusniyar et al. (2016) pun memiliki fokus berbeda, yakni implementasi di Kota Manado dan evaluasi aplikasi keuangan, sehingga tidak sejalan secara langsung dengan substansi penelitian ini.

Dengan demikian, belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik dan menyeluruh mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan menerapkan enam dimensi evaluasi Dunn. Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan melalui integrasi analisis terhadap faktor penghambat pelaksanaan, strategi yang dilakukan oleh lembaga pelaksana (DLH), serta respon masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku. Tidak hanya menilai keberhasilan program, penelitian ini juga menelaah akar masalah dari sisi implementasi dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan, yang diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi perbaikan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh fenomena sosial, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang bersifat kompleks dan multidimensional, karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi di lapangan secara langsung dari para pelaku maupun penerima kebijakan. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah, laporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, literatur akademik, serta publikasi relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, serta dokumentasi.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan kebijakan sampah di Kota Semarang. Teknik ini dilanjutkan dengan snowball

sampling untuk memperluas jaringan informan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, karena mereka merupakan pelaksana utama kebijakan pengelolaan sampah. Informan kunci ini dipilih karena memiliki akses langsung terhadap data implementasi kebijakan, strategi pelaksanaan, serta berbagai kendala dan dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan. Selain DLH, informan lainnya mencakup pengelola bank sampah, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam program pengelolaan sampah, untuk memberikan sudut pandang dari sisi penerima kebijakan dan pelaksana lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara, alat tulis, buku catatan lapangan, dan alat perekam suara. Semua data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, dengan fokus lokasi di beberapa kecamatan yang memiliki volume sampah tinggi serta fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang dan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Proses pengumpulan data dilakukan mulai dari bulan Agustus 2024 hingga April 2025, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang cukup dan mencerminkan kondisi yang terjadi secara berkelanjutan. Durasi ini juga memberikan ruang untuk membandingkan perkembangan kebijakan selama periode tersebut, baik dari segi tantangan maupun upaya perbaikan yang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penulis menggunakan konsep yaitu teori evaluasi Dunn (2003) dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang, meliputi (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Kemerataan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas

Subbab ini membahas sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang telah mencapai tujuannya. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di sekitar TPA Jatibarang dan Kelurahan Kalipancur, kebijakan ini dinilai cukup efektif karena manfaatnya mulai dirasakan, seperti perbaikan sistem pengelolaan sampah dari metode *open dumping* ke sistem yang lebih modern. Namun, masih ditemukan tantangan berupa kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Peraturan Walikota Semarang No. 4 Tahun 2024 menetapkan tujuan kebijakan yang mencakup peningkatan efektivitas pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

Tabel 1. Data Sarana yang Dimiliki Oleh DLH Kota Semarang

No	Nama	Jumlah	Kondisi	
			Layak	Tidak Layak
1	Truk Armroll	111	62	49
2	Truk Dump	31	17	14
3	Mobil Patroli	1	1	-
4	Mobil Pengambil Sampah	2	2	-
5	Roda 3	13	13	-
6	Road Sweeper	2	2	-
7	Truk Tangki	3	3	-
8	Trus Urinoir	2	2	-
9	Excavator	4	2	2
10	Bulldozer	2	1	1
11	Whelloader	1	1	-

Sumber : DLH Kota Semarang (2024)

Data dari DLH Kota Semarang menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan adanya komitmen serius dalam mendukung kebijakan tersebut. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wilson et al. (2006) yang menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

3.2. Efisiensi

Dimensi efisiensi membahas sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dilaksanakan secara efisien, yaitu dalam hal penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, dan sarana prasarana) secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Efisiensi merupakan dimensi penting dalam evaluasi kebijakan karena berkaitan dengan perbandingan antara input dan output yang dihasilkan. Dalam konteks ini, input berupa anggaran dan sumber daya lainnya, sementara output mencerminkan hasil nyata seperti berkurangnya volume sampah, meningkatnya daur ulang, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, diketahui bahwa pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah sebagian besar masih ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk pengadaan armada pengangkut, operasional TPA Jatibarang, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi. Namun, keterbatasan alokasi anggaran dari APBD menjadi tantangan yang cukup signifikan, karena tidak mampu menjangkau seluruh aspek pengelolaan dari hulu hingga hilir secara maksimal. Selain itu, terdapat ketergantungan terhadap retribusi masyarakat, terutama untuk layanan pengangkutan dari sumber ke tempat penampungan sementara (TPS) maupun ke TPA. Wawancara dengan warga dan pelaku usaha, seperti Ibu Sumini, menunjukkan bahwa besaran iuran atau retribusi yang dikenakan sangat bervariasi, tergantung dari kebijakan pengelola lingkungan (RT/RW, pengelola bank sampah, atau koperasi). Tidak adanya standar tarif yang seragam dan adil menyebabkan ketimpangan dalam pembiayaan, dan menjadi potensi permasalahan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sampah.

Selain itu, adanya program seperti bank sampah dan pengelolaan berbasis masyarakat memang berkontribusi terhadap pengurangan beban anggaran pemerintah. Namun, dukungan anggaran dan pelatihan yang minim menyebabkan efektivitas dan efisiensinya belum bisa diandalkan sebagai solusi utama. Banyak bank sampah yang tidak aktif karena kekurangan sarana, tenaga pendamping, dan insentif operasional. Dalam konteks efisiensi kebijakan, situasi ini menggambarkan bahwa meskipun upaya pengelolaan sampah telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, penggunaan sumber daya tersebut belum optimal, baik dari sisi anggaran, tenaga kerja, maupun sarana prasarana. Ketergantungan yang tinggi terhadap kontribusi masyarakat tanpa adanya regulasi tarif yang jelas dan perlindungan akses layanan justru berisiko mengurangi efisiensi dan keadilan. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan, pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif seperti kemitraan dengan sektor swasta dan model pembiayaan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), serta penguatan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menjamin layanan yang setara di seluruh wilayah Kota Semarang. Pemerintah daerah juga perlu menyusun standar biaya layanan minimal sebagai dasar untuk menentukan retribusi yang adil dan rasional. Dengan demikian, dimensi efisiensi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang harus segera ditangani untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pelayanan publik.

3.3. Kecukupan

Dimensi kecukupan dalam evaluasi kebijakan mengukur sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi

masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Dalam konteks ini, kecukupan mencakup tidak hanya tercapainya target-target formal yang ditetapkan dalam perencanaan, tetapi juga sejauh mana dampak kebijakan tersebut dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang tahun 2024, kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan capaian yang mendekati atau bahkan sedikit melampaui target. Pengurangan sampah mencapai 27,67% dari target 28%, sedangkan penanganan sampah mencapai 71,34% dari target 71%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara administratif, program pengelolaan sampah sudah menunjukkan kinerja yang memadai.

Tabel 2. Persentase Antara Target dan Capaian DLH

No	Bidang	Target	Capaian
1	Pengurangan Sampah	28%	27.67%
2	Penanganan Sampah	71%	71.34%

Sumber : DLH Kota Semarang (2024)

Namun, capaian angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tuntasnya permasalahan di lapangan. Masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat, terutama terkait penumpukan sampah di TPA Jatibarang yang setiap harinya menerima antara 900 hingga 1000 ton sampah. Volume yang sangat besar ini menyebabkan antrean panjang kendaraan pengangkut, menimbulkan kemacetan di sekitar area TPA, serta mengakibatkan polusi bau, kebakaran musiman, dan risiko banjir saat musim hujan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun indikator administratif menunjukkan pencapaian yang baik, namun masih terdapat kesenjangan antara hasil kebijakan dan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya, seperti memilah sampah organik dan anorganik, mengompos, atau memanfaatkan bank sampah.

Menurut Alam dan Ahmade (2013), keberhasilan pengelolaan sampah sangat tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam aktivitas pengurangan dan pemilahan sampah rumah tangga. Jika masyarakat tidak terlibat secara langsung, maka sistem yang baik sekalipun tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti jumlah TPS, drop box pemilahan sampah, dan infrastruktur pengolahan sampah di tingkat kelurahan menjadi faktor tambahan yang menghambat terwujudnya kecukupan. Beberapa wilayah bahkan belum tersentuh oleh program edukasi pengelolaan sampah yang memadai, sehingga partisipasi masyarakat bersifat sporadis dan tidak konsisten. Oleh karena itu, meskipun target kebijakan telah tercapai secara kuantitatif, secara kualitatif kebijakan ini belum sepenuhnya cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perlu upaya lanjutan berupa perluasan edukasi, penguatan kelembagaan pengelola sampah di tingkat komunitas, serta penyediaan infrastruktur pendukung agar kebijakan ini mampu memberikan dampak nyata yang berkelanjutan.

3.4. Kemerataan

Dimensi pemerataan dalam kebijakan pengelolaan sampah bertujuan memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Semarang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan. Pemerataan tidak hanya diukur dari penyebaran fasilitas, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut secara aktif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya menyediakan berbagai fasilitas pendukung pengelolaan sampah yang tersebar di berbagai wilayah, seperti 19 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), 5 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta 664 Bank Sampah. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dari 19 TPS 3R tersebut, hanya satu yang berstatus aktif, dua semi aktif, dan sisanya tidak beroperasi. Ketidakterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan TPS 3R menjadi faktor utama tidak berfungsinya fasilitas tersebut. Sebaliknya, seluruh TPST yang dikelola oleh pihak institusional seperti perguruan tinggi (UNDIP, UNNES),

perumahan elite (BSB dan Gemah), maupun lembaga lain seperti Rumah Kompos Pool Timur, menunjukkan status aktif dan beroperasi dengan baik. Hal ini menandakan adanya ketimpangan dalam kapasitas pengelolaan dan kesadaran masyarakat antar wilayah. Wilayah dengan akses pendidikan tinggi dan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi lebih mampu mengelola fasilitas, sementara wilayah lain belum menunjukkan kesiapan serupa.

Tabel 3. Data fasilitas TPST Kota Semarang

No	TPS 3R	Status
1	TPST Undip	Aktif
2	TPST Unnes	Aktif
3	TPST BSB	Aktif
4	TPST Gemah	Aktif
5	Rumah Kompos Pool Timur	Aktif

Sumber : DLH Kota Semarang (2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Sudibyo (2016) bahwa ketersediaan fasilitas tanpa partisipasi masyarakat tidak akan menjamin keberhasilan program. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara menyeluruh dan merata. Dibutuhkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif, termasuk edukasi, pelatihan teknis, dan dukungan kelembagaan lokal, agar seluruh wilayah di Kota Semarang memiliki kapasitas yang setara dalam mengelola sampah. Tanpa upaya tersebut, pemerataan hanya akan bersifat simbolik dan belum menyentuh substansi keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan.

3.5. Responsivitas

Dimensi responsivitas dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah menilai sejauh mana pemerintah Kota Semarang mampu menangkap, menanggapi, dan menyesuaikan kebijakannya terhadap kebutuhan serta perubahan yang terjadi di masyarakat. Responsivitas merupakan indikator penting dari pemerintahan yang adaptif dan proaktif terhadap dinamika sosial dan lingkungan. Salah satu kebijakan yang mencerminkan tingkat responsivitas tinggi adalah diterbitkannya Instruksi Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Instruksi ini merespons keprihatinan masyarakat dan aktivis lingkungan terhadap volume sampah plastik yang sulit terurai. Penerapan kebijakan tersebut disambut baik oleh masyarakat, terbukti dengan meningkatnya penggunaan wadah alternatif seperti tumbler, tote bag, dan tempat makan sendiri. Pemerintah juga mendukung kebijakan ini melalui penyediaan dispenser air minum gratis di fasilitas publik, seperti taman kota dan kantor pelayanan publik, sehingga mendorong perilaku ramah lingkungan secara lebih luas. Namun, tidak semua program pengelolaan sampah memperoleh respons serupa. Program pemilahan sampah dari rumah tangga yang terintegrasi dengan bank sampah tingkat RW masih menunjukkan hasil yang kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, banyak masyarakat mengaku malas memilah sampah karena menganggapnya merepotkan, serta minimnya pemahaman mengenai manfaat ekonomi dan lingkungan dari kegiatan tersebut. Padahal, program ini berpotensi besar dalam mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya responsivitas pemerintah belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih integratif, termasuk pendekatan edukatif, kampanye yang berkelanjutan, serta pemberian insentif kepada warga yang aktif berpartisipasi. Seperti dinyatakan Firdaus (2020), perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tidak bisa dicapai hanya dengan instruksi atau sosialisasi, tetapi membutuhkan kombinasi antara penyuluhan yang intensif, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung, serta insentif yang relevan dan menarik. Dengan cara ini, kebijakan akan menjadi lebih responsif sekaligus efektif dalam jangka panjang.

3.6. Ketepatan

Dimensi ketepatan dalam evaluasi kebijakan mengacu pada kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan cara pencapaiannya, serta efektivitas penggunaan sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Semarang, ketepatan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana program-program yang diterapkan mampu menjawab persoalan pokok, yakni tingginya timbulan sampah yang masuk ke TPA Jatibarang, serta rendahnya tingkat pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, diketahui bahwa kebijakan pengurangan timbulan sampah di TPA Jatibarang belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumber, meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada DLH, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak, seperti masyarakat, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas lingkungan. Namun, keterlibatan pihak-pihak tersebut belum terjadi secara merata dan intensif. Kebijakan yang tidak tepat sasaran juga terlihat dari kurangnya integrasi antara edukasi dan insentif, serta belum adanya penguatan terhadap kapasitas kelembagaan di tingkat RT/RW untuk mengelola sampah secara mandiri. Meskipun beberapa inisiatif seperti bank sampah dan TPS 3R telah dibentuk, keberadaannya belum mampu mengatasi masalah utama secara menyeluruh. Menurut Sembiring dan Nitivattananon (2010), keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas yang kolaboratif perlu diperkuat. Pemerintah harus menyesuaikan strategi implementasi agar lebih menyentuh akar permasalahan, seperti perilaku individu dan sistem kontrol sosial di tingkat lingkungan. Dengan langkah tersebut, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat menjadi lebih tepat guna dan tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap perubahan yang diharapkan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap enam dimensi evaluasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang, penelitian ini menemukan sejumlah temuan penting yang mencerminkan kompleksitas kebijakan, dinamika sosial, serta tantangan implementasi di tingkat lokal. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang secara umum menunjukkan adanya kemajuan dalam hal penyediaan infrastruktur dan regulasi, namun masih terdapat kesenjangan antara capaian administratif dengan kondisi faktual di lapangan. Dari dimensi efektivitas, capaian target penanganan sampah yang melebihi angka 71% menjadi indikator positif atas upaya pemerintah dalam mengelola sampah secara sistematis. Namun, keberhasilan tersebut belum diiringi dengan capaian pada aspek pengurangan sampah di sumber. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah rumah tangga menjadi penyebab utama belum optimalnya pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA. Purnomo dan Sa'diyah (2020) menjelaskan bahwa tingkat *ecoliteracy* masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, sehingga mereka cenderung kurang memahami peran strategis dalam mengurangi sampah sejak dari rumah tangga. Ini menjadi tantangan mendasar dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi. Dari sisi efisiensi, fasilitas seperti TPS 3R, TPST, dan bank sampah memang telah dibangun dan tersebar di banyak wilayah, tetapi tidak semuanya dimanfaatkan secara optimal. Beberapa TPS 3R bahkan dalam kondisi tidak aktif karena rendahnya inisiatif masyarakat atau lemahnya kelembagaan pengelola. Ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan manfaat nyata. Sa'diyah, Purnomo, dan Kasiwi (2020) menekankan bahwa dalam kerangka *smart city*, efisiensi kebijakan sangat bergantung pada kolaborasi antara teknologi, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi publik. Tanpa ketiganya, efisiensi hanya akan menjadi indikator administratif semata.

Pada dimensi kecukupan, secara kuantitatif target sudah hampir tercapai, namun permasalahan utama seperti penumpukan sampah hingga 1000 ton per hari di TPA Jatibarang, antrean truk, bau menyengat, hingga ancaman kebakaran dan banjir masih terjadi. Ini menandakan bahwa substansi masalah belum terselesaikan. Target administratif tidak cukup jika tidak diiringi dengan solusi struktural dan perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya, dimensi pemerataan menunjukkan adanya ketimpangan. Meskipun fasilitas tersedia secara menyebar, sebagian besar TPS 3R yang aktif berada di wilayah dengan kapasitas sosial-ekonomi yang tinggi seperti kawasan universitas dan perumahan elit. Wilayah lain masih belum mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia karena lemahnya pemberdayaan masyarakat. Ufnia dan Hendrayanti (2023) mengungkapkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh pendekatan partisipatif dan pemberdayaan, bukan hanya pada pembangunan fisik infrastruktur. Pada dimensi responsivitas, Pemkot Semarang menunjukkan respons cepat terhadap isu penggunaan plastik dengan menerbitkan Instruksi Walikota tentang pembatasan plastik sekali pakai. Kebijakan ini mendapat sambutan baik, terbukti dari perubahan perilaku masyarakat seperti penggunaan tumbler dan air dispenser umum. Namun, responsivitas ini tidak merata, karena program lain seperti bank sampah skala RW masih belum berhasil menggerakkan partisipasi luas.

Terakhir, dari dimensi ketepatan, kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih belum menyentuh akar permasalahan, yakni minimnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Upaya sosialisasi belum mampu membentuk perilaku jangka panjang. Oleh karena itu, perlu pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta strategi komunikasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Tanpa itu, kebijakan hanya akan bersifat administratif dan tidak menyentuh perubahan struktural yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, merata, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang menggunakan teori enam dimensi dari William N. Dunn (2003), dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Dari keenam dimensi evaluasi, hanya dimensi pemerataan yang dinilai berjalan efektif karena fasilitas pengelolaan sampah telah tersebar merata di berbagai wilayah. Sementara itu, dimensi lain masih menghadapi berbagai kendala. Dalam dimensi efektivitas, pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sinkron. Efisiensi pengelolaan sampah pun belum tercapai karena keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada retribusi masyarakat. Pada dimensi kecukupan, kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan karena minimnya partisipasi aktif masyarakat. Meskipun terdapat respon positif masyarakat terhadap program pengurangan plastik, pada dimensi responsivitas secara keseluruhan masih dibutuhkan strategi lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan publik. Terakhir, dari sisi ketepatan, meski pemerintah telah melakukan sosialisasi dan edukasi, kurangnya perubahan perilaku masyarakat membuat dampak kebijakan belum dirasakan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan pengelolaan sampah dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada wawancara dengan pihak internal DLH Kota Semarang, sehingga pandangan masyarakat belum tergambarkan secara menyeluruh. Fokus pada satu wilayah membuat hasil belum dapat digeneralisasi. Selain itu, pendekatan kualitatif membatasi pengukuran kuantitatif efektivitas kebijakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan di daerah lain untuk membandingkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Metode kuantitatif juga perlu diterapkan guna mengukur efektivitas dan dampak kebijakan secara lebih objektif dan menyeluruh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian ini, serta semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan laporan penelitian ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, P., & Ahmade, K. (2013). Impact of Solid Waste on Health and the Environment. *International Journal of Sustainable Development and Green Economics (IJSDDGE)*, 2(1), 165–168. <https://intelligentjo.com/images/Papers/general/waste/IMPACT-OF-SOLID-WASTE-ON-HEALTH-AND-THE-ENVIRONMENT.pdf>
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2006). *Pengolahan sampah*. Institut Teknologi Bandung.
- Dunn, N. William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, R. (2020). *Perilaku Lingkungan dan Strategi Perubahan Sosial*. Penerbit Hijau Lestari.
- Harjanti, D., & Anggraini, W. (2020). Pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang: Studi fasilitas dan dampak lingkungan. *Jurnal Planologi*, 17(2), 45–54. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.9943>
- Hasibuan, Rosmidah. (2016). “Analisis Dampak Limbah/ Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 04.01, 42–52. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/354>
- Ilhami, N. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. <http://eprints.ipdn.ac.id/19586/>
- Irmawati. (2022). “Hubungan Perilaku Masyarakat Dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Tamua Kota Makassar.” *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.32382/sulolipu.v22i2.2930>
- Meyrena, S. D., Amelia, R.. (2020). “Analisis Pendayagunaan Limbah Plastik Menjadi Eco Paving Sebagai Upaya Pengurangan Sampah”, *Indonesian Journal of Conservation*, 9.2, 96–100. <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27549>
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/23860>
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Purnomo, E. P., & Sa”diyah, A. F. (2020). “Membangun ecoliteracy dan penegakan hukum persampahan”. *Jurnal Khatulistiwa*, 6(2), 97–106. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/3365/1588>
- Rahmawati, A., Sinaga, H. D., Rajib, R. K.. (2020). “Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah Melalui Implementasi Kebijakan Dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmiah* 1.5, 326–33. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/1366>
- Ramadanti, I., Rahmah, M.. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. <http://eprints.ipdn.ac.id/18959/>
- Rendy, M.. (2015). "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan

- Pertanaman Kota Palu." *Katalogis*, vol. 3, no. 11, 2015. <https://www.neliti.com/id/publications/155948/evaluasi-kebijakan-pengelolaan-sampah-di-dinas-kebersihan-dan-pertanaman-kota-pa#cite>
- Sa'diyah, A. F., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). "Pengelolaan sampah dalam implementasi smart city di Kota Bogor". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 271–279. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/773>
- Salsabila, N., Nurcahyanto, H., & Yuniningsih, T. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Public Policy and Management Review*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/44606>
- Santosa, T. A., Supratiwi, & Marlina, N.. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43583>
- Sembing, E., & Nitivattananon, V. (2010). Sustainable solid waste management toward an inclusive society: Integration of the informal sector. *Resources, Conservation and Recycling*, 54(11), 802–809. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2009.12.010>
- Setyono, Agus Eko, and Nazaruddin Sinaga. (2021). "Zero Waste Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Optimalisasi Waste To Energy", *Eksergi*, 17.2, 116. <https://doi.org/10.32497/eksergi.v17i2.2619>
- Sholehatin, A., Lituhayu, D., (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/50719>
- SIPSN. (2023). "Data Timbulan Sampah Nasional", <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/bsu>
- Sudibyoy, M. (2016). *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Konsep dan Implementasi*. Pustaka Hijau Indonesia.
- Suwerda, W. (2012). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Gadjah Mada University Press.
- Ufnia, S., & Hendrayanti, H. (2023). "Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat". *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 211–227. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/3647>
- Wilson, D. C., Velis, C. A., & Cheeseman, C. R. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 36(4), 523-530. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005>
- World Bank. (2023). "Atlas of Sustainable Development Goals", *World Bank Group*, <https://datatopics.worldbank.org/sdcatlas/goal-11-sustainable-cities-and-communities?lang=en>
- Yusniyar, Darwanis, Abdullah, S.. (2016). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP GOOD GOVERNANCE DAN DAMPAKNYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SKPA PEMERINTAH ACEH). *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*. <https://jurnal.usk.ac.id/JAA/article/view/4514>
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB)*, 5(1), 256–271. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/599>
- Zhang, L., Zhao, W., & Zhang, Y. (2023). Promoting and maintaining public participation in waste separation policies—A comparative study in Shanghai, China. *Resources, Environment and Sustainability*, 12, 100104. <https://doi.org/10.1016/j.resenv.2023.100104>